



PENDAMPINGAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEWAJIBAN PAJAK UNTUK MEMBANGUN KELUARGA MELEK FINANSIAL

Ester Melania Pasamba

Program Studi Akuntansi, Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura¹

Email Korespondensi: estermipasamba@gmail.com[✉]

Info Artikel	ABSTRAK
Histori Artikel: Masuk: 22 Oktober 2025 Diterima: 26 November 2025 Diterbitkan: 01 Desember 2025 Kata Kunci: Literasi Keuangan; Perencanaan Keuangan Keluarga; Pajak; NPWP; Pemberdayaan Masyarakat.	Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan keluarga serta pemahaman kewajiban perpajakan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang selama ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan pendapatan dan akses edukasi finansial. Program dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang diawali dengan analisis kebutuhan, penyusunan materi kontekstual, dan implementasi pelatihan berbasis praktik, termasuk penggunaan <i>worksheet</i> budgeting dan simulasi kasus perpajakan sederhana. Sebanyak 50 kepala keluarga mengikuti kegiatan secara penuh, menunjukkan tingkat partisipasi dan keterlibatan yang tinggi. Hasil pre-test dan post-test memperlihatkan peningkatan pemahaman yang signifikan, terutama pada kemampuan menyusun anggaran, mencatat arus kas, serta memahami fungsi NPWP dan mekanisme pajak bagi pelaku usaha kecil. Peserta juga mulai melihat bahwa perencanaan keuangan dan pajak merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam menjaga stabilitas finansial keluarga. Kesimpulannya, pendampingan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memicu perubahan perilaku finansial dasar yang berpotensi menjadi fondasi budaya pengelolaan keuangan yang lebih sehat di wilayah kepulauan. Program ini direkomendasikan untuk dilanjutkan melalui pendampingan komunitas agar dampaknya semakin berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perencanaan keuangan keluarga merupakan fondasi utama yang menopang stabilitas dan kesejahteraan rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keluarga dalam mengelola pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan mitigasi risiko berpengaruh langsung terhadap ketahanan ekonomi dan kualitas hidup mereka. Pengetahuan keuangan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga, sebagaimana hasil penelitian pada ibu rumah tangga di Toraja Utara, di mana pengetahuan keuangan menjelaskan 62,5% variasi dalam kemampuan keluarga menyusun perencanaan keuangan yang sehat (Palimbong, 2023). Keterbatasan pengetahuan dasar, seperti pencatatan keuangan, penganggaran, dan pemilahan kebutuhan, menjadi akar masalah yang menyebabkan keluarga sulit keluar dari siklus defisit dan kerentanan ekonomi.

Selain kemampuan teknis, kesadaran masyarakat dalam merencanakan keuangan juga memainkan peran penting dalam pencapaian kesejahteraan keluarga. Studi pada warga Jatinangor menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dalam perencanaan keuangan berkorelasi positif dengan kesejahteraan keluarga secara material maupun psikologis (Wulandari & Sutjiati, 2016). Tingkat kesadaran ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang pengelolaan pendapatan, tetapi juga sikap terhadap pengeluaran, tabungan, investasi, dan kesiapan menghadapi risiko. Namun, riset tersebut menggarisbawahi bahwa banyak keluarga hanya membuat daftar pendapatan dan pengeluaran tanpa

perencanaan yang komprehensif, sehingga mereka rentan terhadap pengeluaran tak terduga yang mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga.

Di sisi lain, perkembangan literasi keuangan di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Literasi keuangan syariah, misalnya, masih berada pada level 9,14% secara nasional, dan inklusi keuangan syariah hanya mencapai 12,12%, menandakan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan sesuai nilai-nilai syariah maupun instrumen keuangan modern kondisi ini sangat relevan dengan karakteristik masyarakat di kawasan kepulauan seperti Aru (Nurhaida *et al.*, 2023). Kegiatan pengabdian yang dilakukan di berbagai daerah menunjukkan bahwa pelatihan berbasis komunitas mampu meningkatkan pemahaman dan kecakapan masyarakat dalam menyusun anggaran, melakukan evaluasi kondisi keuangan, dan memilih instrumen investasi yang aman dan sesuai kebutuhan.

Konteks Kabupaten Kepulauan Aru memperlihatkan tantangan yang lebih kompleks. Sebagai wilayah kepulauan dengan akses terbatas terhadap informasi, infrastruktur digital, dan layanan perbankan formal, masyarakat Aru menghadapi hambatan struktural dalam mengembangkan literasi keuangan. Minimnya layanan pajak, sulitnya akses ke perbankan, dan keterbatasan edukasi finansial formal memperparah kondisi ini. Di banyak desa, keluarga tidak terbiasa menyusun anggaran, tidak mengetahui pentingnya dana darurat, dan belum memahami risiko penggunaan kredit berbunga tinggi. Situasi ini sejalan dengan temuan di berbagai daerah bahwa pengelolaan keuangan keluarga masih dilakukan secara tradisional, fokus pada konsumsi, dan rentan pada pilihan investasi yang tidak aman atau bahkan penipuan finansial (Nurhaida *et al.*, 2023).

Sementara itu, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan belum terintegrasi dalam praktik keuangan keluarga. Studi literatur dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor informal cenderung menganggap pajak sebagai beban, bukan sebagai bagian dari perencanaan keuangan yang bertanggung jawab. Padahal, pemahaman pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan, mengurangi risiko sanksi administratif, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Keterkaitan antara literasi keuangan dan kesadaran pajak belum banyak disentuh dalam program pemberdayaan masyarakat di wilayah timur Indonesia, sehingga menjadi celah penting yang perlu dijawab melalui program pengabdian ini.

Melihat kondisi tersebut, program pendampingan perencanaan keuangan dan kewajiban pajak menjadi sangat urgen untuk dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Aru. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan teknis mengenai pencatatan keuangan, penyusunan anggaran, dan pengelolaan risiko, tetapi juga pada integrasi kewajiban pajak dalam arsitektur perencanaan keuangan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi berbagai penelitian yang menekankan pentingnya metode partisipatif dan edukasi berbasis komunitas untuk meningkatkan literasi keuangan keluarga secara signifikan.

Dengan demikian, tujuan utama kegiatan pengabdian ini untuk meningkatkan literasi dan keterampilan keluarga dalam menyusun perencanaan keuangan, menanamkan pemahaman mengenai kewajiban pajak sebagai bagian integral dari perencanaan keuangan yang sehat, dan membangun kesadaran bahwa stabilitas keuangan keluarga berkorelasi dengan kontribusi warga terhadap pembangunan daerah. Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya dirasakan pada tingkat keluarga melalui peningkatan kesejahteraan dan kemandirian finansial, tetapi juga berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak, penambahan basis pajak daerah, serta penguatan kapasitas masyarakat untuk menjadi kontributor aktif dalam pembangunan di Kepulauan Aru.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program pengabdian ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi (*community empowerment*) yang disusun melalui tahapan terencana mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi akhir. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sugiyono

(2019) bahwa suatu intervensi sosial yang efektif harus dirancang melalui langkah-langkah sistematis meliputi *need assessment*, perancangan solusi, implementasi, dan evaluasi agar menghasilkan perubahan pengetahuan dan perilaku yang terukur. Selain itu, prinsip partisipatif sebagaimana ditegaskan Adi (2013) menjadi dasar bahwa keterlibatan warga sejak tahap awal hingga akhir program akan meningkatkan keberterimaan, relevansi solusi, dan keberlanjutan dampak dalam konteks lokal.

Tahap persiapan dimulai dengan koordinasi bersama pemerintah setempat serta tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru. Koordinasi ini tidak hanya untuk memperoleh izin formal, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan memiliki legitimasi sosial sehingga memudahkan mobilisasi peserta. Selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan melalui wawancara cepat kepada calon peserta terkait tingkat literasi keuangan, kebiasaan pengelolaan pendapatan, pemahaman mengenai anggaran keluarga, serta pengenalan terhadap kewajiban perpajakan. Teknik identifikasi kebutuhan ini mengikuti model *rapid needs assessment* yang dikemukakan McKillip (1987), di mana pengumpulan data awal yang akurat merupakan fondasi penyusunan program edukasi yang tepat sasaran. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memetakan karakteristik sosial-ekonomi peserta, seperti tingkat pendidikan, sumber pendapatan, serta akses terhadap layanan keuangan dan layanan pajak. Temuan analisis ini memperlihatkan karakteristik serupa dengan kondisi yang dijelaskan dalam penelitian mengenai rendahnya literasi keuangan di komunitas ibu rumah tangga serta dampaknya terhadap kemampuan menyusun perencanaan keuangan yang memadai (Palimbong, 2023).

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim menyusun materi pelatihan yang komprehensif namun tetap kontekstual. Materi perencanaan keuangan disusun berlandaskan teori perencanaan keuangan keluarga seperti yang dijelaskan Aulia (2009), termasuk konsep arus kas, penyusunan anggaran, dana darurat, serta pengelolaan utang. Di sisi lain, materi kewajiban perpajakan dirancang berdasarkan konsep perpajakan Indonesia dalam buku Waluyo (2017), meliputi pajak penghasilan, NPWP, dan prinsip dasar PPN. Seluruh materi disusun menggunakan bahasa sederhana, diperkuat dengan infografis, studi kasus, serta *worksheet* agar mudah dipahami oleh peserta dengan latar pendidikan yang beragam.

Tahap pelaksanaan kegiatan dimulai dengan registrasi dan pre-test untuk mengukur kemampuan awal peserta. Penggunaan model pre-post test mengacu pada rekomendasi Fraenkel, Wallen, dan Hyun (2012) bahwa pengukuran sebelum dan sesudah pelatihan merupakan metode paling efektif untuk menilai perubahan kognitif dalam program edukasi. Setelah pembukaan, pelatihan dilanjutkan dengan sesi inti pertama mengenai perencanaan keuangan keluarga. Sesi ini memadukan metode ceramah interaktif, diskusi, dan latihan penyusunan anggaran menggunakan lembar kerja. Pendekatan praktis seperti ini direkomendasikan Kapoor, Dlabay, dan Hughes (2016) dalam model *personal finance education*, karena praktik langsung membantu peserta memahami hubungan antara pemasukan, pengeluaran, dana darurat, dan kemampuan memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Sesi inti kedua membahas kewajiban perpajakan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi dan simulasi kasus, peserta memahami bagaimana pajak dihitung, kapan pajak dikenakan, serta bagaimana keluarga dapat menyisihkan dana untuk memenuhi kewajiban pajak secara terencana. Penyederhanaan konsep pajak ini sangat penting mengingat penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keluarga seringkali menganggap pajak sebagai beban, bukan sebagai bagian dari perencanaan keuangan yang sehat. Sesi integrasi kemudian mempertemukan kedua konsep keuangan dan pajak melalui simulasi kelompok. Peserta diminta menganalisis profil keuangan sebuah keluarga, menyusun anggaran, dan menentukan strategi penyisihan pajak. Metode *case-based learning* ini merujuk pada Herreid (2011) yang menekankan efektivitas studi kasus dalam meningkatkan kemampuan analitis dan pengambilan keputusan finansial peserta.

Tahap penutupan dilakukan melalui post-test dan evaluasi kegiatan. Pengukuran peningkatan pengetahuan peserta dianalisis menggunakan metode *gain score* sebagaimana dianjurkan dalam penelitian evaluasi program edukasi (Fraenkel et al., 2012). Selain itu, peserta mengisi lembar evaluasi

berbasis model evaluasi Kirkpatrick Level 1–2 (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2016) untuk menilai kepuasan, pemahaman materi, serta kesan terhadap metode penyampaian.

Tahap pasca-kegiatan mencakup analisis data, penyusunan laporan, dan tindak lanjut. Analisis hasil *pre-post test* digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan dalam meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman pajak peserta. Tindak lanjut dilakukan dengan membentuk grup komunikasi melalui WhatsApp sebagai kanal edukasi lanjutan dan konsultasi ringan. Strategi *follow-up support* ini sejalan dengan rekomendasi OECD (2018) yang menekankan pentingnya keberlanjutan bimbingan dalam program literasi keuangan agar perubahan perilaku dapat bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, dilakukan monitoring terbatas kepada beberapa peserta untuk melihat penerapan praktik budgeting dan kepatuhan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode pelaksanaan yang terstruktur dan memadukan analisis kebutuhan, pelatihan partisipatif, simulasi kasus, dan evaluasi, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan literasi keuangan dan kesadaran pajak keluarga di Kabupaten Kepulauan Aru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan literasi keuangan dan kewajiban perpajakan bagi 50 kepala keluarga di Kabupaten Kepulauan Aru menghasilkan sejumlah temuan penting yang menggambarkan perubahan signifikan pada pemahaman dan perilaku finansial masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi; seluruh peserta hadir dari awal hingga akhir program dan menunjukkan keterlibatan aktif selama proses diskusi, tanya jawab, hingga simulasi kasus. Antusiasme ini menandakan bahwa isu pengelolaan keuangan keluarga dan kewajiban perpajakan merupakan kebutuhan nyata masyarakat setempat, terutama bagi peserta dengan pendapatan tidak tetap seperti nelayan dan pedagang kecil.

Perubahan paling terlihat terletak pada peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil pre-test menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman awal yang rendah terkait pencatatan arus kas, penyusunan dana darurat, serta peran pajak dalam kehidupan sehari-hari, dengan rata-rata skor 41,9. Setelah kegiatan berlangsung, nilai rata-rata meningkat hingga 79,1, mencerminkan kenaikan pemahaman sebesar 82,3%. Peningkatan terbesar terlihat pada kemampuan peserta memahami pentingnya pencatatan pengeluaran rutin, membuat alur kas sederhana, serta melakukan perhitungan dasar pajak UMKM dan fungsi NPWP. Peningkatan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan pembelajaran berbasis praktik, khususnya penggunaan lembar kerja budgeting dan simulasi kasus, sangat efektif membantu peserta memahami konsep-konsep keuangan yang sebelumnya dianggap rumit atau jauh dari keseharian mereka.

Hasil kegiatan juga menunjukkan adanya perubahan signifikan pada cara pandang peserta terhadap perencanaan keuangan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta mengelola keuangan secara spontan tanpa pencatatan tertulis, sehingga sulit memetakan kebutuhan, menentukan prioritas, atau mempersiapkan dana darurat. Setelah sesi latihan, mayoritas peserta mampu menyusun anggaran keluarga sederhana yang mencakup pemisahan kebutuhan dan keinginan, alokasi tabungan, serta penentuan porsi pendapatan untuk pos-pos tertentu. Peserta mulai memahami bahwa perencanaan keuangan bukan hanya untuk meningkatkan tabungan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko finansial yang dapat muncul sewaktu-waktu, seperti sakit, kerusakan alat kerja, atau kebutuhan pendidikan anak.

Pada sisi perpajakan, kegiatan ini berhasil mengurangi persepsi negatif yang selama ini melekat kuat di benak sebagian peserta. Banyak peserta yang awalnya menganggap pajak sebagai beban dan merasa bahwa kewajiban tersebut hanya relevan bagi pegawai atau pelaku usaha besar. Setelah mendapat penjelasan mengenai mekanisme PPh Final 0,5% untuk pelaku usaha kecil, ketentuan PTKP, serta manfaat memiliki NPWP untuk pembiayaan dan legalitas usaha, peserta semakin memahami

bahwa pajak tidak selalu membebani dan bahkan dapat memberikan perlindungan administratif bagi usaha mereka. Pemahaman ini diperkuat dengan simulasi sederhana tentang alur pendaftaran NPWP serta contoh nyata bagaimana pajak berkontribusi pada pembangunan fasilitas umum di sekitar mereka, seperti jalan desa, dermaga kecil, dan fasilitas sekolah.

Salah satu hasil penting kegiatan ini adalah tumbuhnya pemahaman mengenai sinergi antara perencanaan keuangan dan kewajiban perpajakan. Sebelum pendampingan, tidak satu pun peserta yang menyisihkan pendapatan untuk pos pajak karena mereka tidak memahami bahwa pajak dapat menjadi bagian integral dari pengelolaan keuangan keluarga yang sehat. Melalui sesi integrasi, peserta mulai memasukkan komponen pajak ke dalam rancangan anggaran mereka, meskipun dalam jumlah sederhana. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar membelanjakan pendapatan secara spontan menjadi perencanaan finansial yang lebih matang dan bertanggung jawab.

Seluruh rangkaian kegiatan juga mengungkap beberapa tantangan yang dihadapi peserta dalam menginternalisasi materi. Perbedaan tingkat pendidikan dan literasi dasar membuat sebagian peserta membutuhkan penjelasan berulang dan pendampingan intensif selama praktik. Namun, penggunaan bahasa sederhana, ilustrasi visual, dan contoh-contoh yang sesuai dengan konteks ekonomi lokal mampu membantu meminimalkan hambatan tersebut. Keterbatasan konektivitas internet di beberapa wilayah desa juga menyulitkan pengenalan layanan perpajakan berbasis digital, sehingga tindak lanjut dilakukan dengan pendekatan luring melalui perangkat desa dan pembentukan grup komunikasi melalui WhatsApp yang dapat diakses secara terbatas.

Dampak langsung dari kegiatan ini dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan peserta dalam membuat anggaran keluarga, memahami fungsi NPWP, serta melakukan perhitungan dasar pajak UMKM. Selain itu, beberapa peserta menyampaikan rencana konkret seperti membuka rekening tabungan khusus dana pendidikan, memulai pencatatan pengeluaran harian, atau melakukan konsultasi lebih lanjut terkait legalitas usaha mereka. Pemerintah desa juga menunjukkan minat untuk mengadopsi modul pelatihan sebagai materi edukasi lanjutan dalam forum PKK, kelompok nelayan, dan kegiatan karang taruna, sehingga membuka peluang keberlanjutan program di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku finansial yang lebih sehat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa intervensi yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan, menggunakan pendekatan partisipatif, serta menempatkan materi dalam konteks kehidupan nyata masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap literasi keuangan dan kesadaran perpajakan keluarga di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Aru.

PENUTUP

Kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang dirancang berdasarkan karakteristik ekonomi masyarakat kepulauan mampu menghasilkan perubahan yang nyata dan terukur. Peningkatan pengetahuan peserta dalam menyusun anggaran keluarga, memahami arus kas, serta mengenali kewajiban perpajakan membuktikan bahwa metode berbasis praktik seperti studi kasus dan *worksheet budgeting* mampu menjembatani kesenjangan literasi yang selama ini menjadi tantangan di Kepulauan Aru. Lebih dari sekadar pengetahuan, kegiatan ini berhasil menumbuhkan cara pandang baru bahwa perencanaan keuangan dan pajak merupakan dua komponen yang saling menguatkan dalam membangun stabilitas finansial keluarga.

Dampak kegiatan ini terlihat dari mulai terbentuknya kebiasaan finansial sederhana namun penting, seperti pencatatan pengeluaran, penyisihan dana darurat, serta alokasi khusus untuk pajak bagi peserta yang memiliki usaha. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi materi keuangan dan perpajakan adalah model pendampingan yang relevan bagi masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh edukasi finansial formal. Untuk memastikan keberlanjutan, pemerintah desa dan komunitas lokal diharapkan

dapat melanjutkan praktik yang telah diperkenalkan, sehingga perubahan perilaku yang mulai terbentuk dapat berkembang menjadi budaya pengelolaan keuangan keluarga yang lebih sehat dan berdaya di wilayah kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aulia, S. (2009). *Perencanaan keuangan keluarga*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2015). *The systematic design of instruction* (8th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education* (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Herreid, C. F. (2011). *Case studies and the flipped classroom*. Washington, DC: National Science Teaching Association.
- Kapoor, J. R., Dlabay, L. R., & Hughes, R. J. (2016). *Personal finance*. New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2016). *Kirkpatrick's four levels of training evaluation*. Alexandria, VA: ATD Press.
- McKillip, J. (1987). *Need analysis: Tools for the human services and education*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Nurhaida, D., Kusuma Wijaya, A., Taufiqurokhman, Andriansyah, & Qolbiyyah, Q. (2023). Pelatihan perencanaan keuangan keluarga dan investasi sesuai prinsip syariah. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(1), 162–175. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i1.19328>
- OECD. (2018). *OECD/INFE toolkit for measuring financial literacy and financial inclusion*. Paris: OECD Publishing.
- Palimbong, S. M. (2023). Pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga. *Jurnal Metaverse Adptersi*, 2(1), 25–35. <https://jurnal.adptersi.or.id/index.php/jma/article/view/404>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, F. A., & Sutjiati, R. (2016). Pengaruh tingkat kesadaran masyarakat dalam perencanaan keuangan keluarga terhadap kesejahteraan: Studi pada warga Komplek BCP, Jatinangor. *Jurnal Siasat Bisnis*, 18(1), 21–31. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol18.iss1.art3>